

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KOP SURAT KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS

DAFTAR KONTRAKTOR/SUBKONTRAKTOR/PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN YANG DIDANAI HIBAH MCC

NOMOR.....

NO.	KONTRAKTOR/ SUBKONTRAKTOR/ PIHAK-PIHAK	ALAMAT	NPWP	TANGGAL DAN NOMOR KONTRAK	PEKERJAAN YANG DIKONTRAKKAN /SUBKONTRAK	NILAI KONTRAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Ditetapkan di
pada tanggal
KPA Satker

(nama lengkap)
NIP

[Handwritten signature]



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

DAFTAR ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI
PADA SAAT MULAI BEKERJA DALAM KEGIATAN YANG DIBIYAI OLEH HIBAH MCC

NO	NAMA	NPWP	ALAMAT	TANGGAL KEDATANGAN DI INDONESIA	JABATAN	PEMBERI KERJA		KETERANGAN
						NAMA	NPWP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
dst.								

Yang menyerahkan,

(Jabatan dan Nama Lengkap)

.....

NIP

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIREU UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T KEMENTERIAN

u.b. UMUM

GIARTO

NIP 195907201984021001

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

12/6/13



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

[KOP SURAT]

PERMINTAAN KONFIRMASI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (Pph) PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... /PMK ... /2012 tanggal ... tentang ..., dengan ini kami mohon bantuan Kepala KPP untuk memberikan konfirmasi mengenai pemotongan Pajak Penghasilan (Pph) yang dilakukan oleh:

Nama :
NPWP :

Pemotongan Pph yang diminta untuk konfirmasi adalah sebagai berikut:

NO	PENERIMA PENGHASILAN	JENIS PPh	BUKTI POTONG		MASA PAJAK- TAHUN PAJAK	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PPh (Rp)	JAWABAN PERMINTAAN KONFIRMASI (SESUAI/TIDAK SESUAI)	PENJELASAN (10)
			NOMOR	TANGGAL					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Nama : NPWP :								
2.									
dst.									

Yang Memberi Konfirmasi,

(Jabatan dan Nama Lengkap)

NIP

Yang Meminta Konfirmasi,

(Jabatan dan Nama Lengkap)

NIP

Keterangan:

- a. Kolom (1) sampai dengan (8) :
Kolom (9) dan (10) :
b. Kolom (2) :
Kolom (3) :
Kolom (4),(5), (7) dan (8) :
Kolom (6) :
Kolom (9) dan (10) :

diisi oleh pihak yang meminta konfirmasi kepada KPP
diisi oleh KPP sesuai data yang dimiliki KPP pada saat konfirmasi ini dijawab
NPWP penerima penghasilan dicantumkan dibawah Nama penerima penghasilan
diisi jenis Pajak Penghasilan yang dipotong, yaitu PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26
cukup jelas
diisi Masa dan Tahun Pajak pemotongan PPh, contoh: 12 - 2012 (untuk Masa Pajak Desember 2012)
diisi oleh KPP sesuai data yang dimiliki KPP pada saat konfirmasi ini dijawab

Bi 11/12



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -
[KOP SURAT]

PERMINTAAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK

Selubungan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.../2012 tentang ..., dengan ini kami mohon bantuan Kepala KPP ... untuk memberikan konfirmasi Faktur Pajak atas penyerahan BKP/JKP yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak (PKP):

Nama PKP :
NPWP :
Alamat :
Faktur Pajak yang dikonfirmasi yaitu:

FAKTUR PAJAK		TANGGAL		JUMLAH PPN (RP)	JUMLAH P-PBM (RP)	JAWABAN PERMINTAAN KONFIRMASI (A/B/C/D/E/G)	PENJELASAN
NO	NOMOR	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)							
1							
2							
3							
dst.							
Jumlah							

Jawaban Permintaan Konfirmasi diisi sebagai berikut:

- A. Ada dan sesuai (FP belum direkam)
- B. Ada dan sesuai (FP terlambat dilaporkan PKP)
- C. Ada tetapi tidak sama tgl dan atau kode nomor seri FP
- D. Tidak ada (FP belum dilaporkan dan sudah diterbitkan SKPKB/SKPKBT)
- E. Tidak ada (FP tidak sah karena Wajib Pajak belum dikukuhkan sebagai PKP)
- F. Tidak ada (FP tidak sah karena PKP tidak pernah melakukan penyerahan BKP/JKP)
- G. Lain-lain (Jelaskan).

Yang Memberi Konfirmasi,
(Jabatan dan Nama Lengkap)

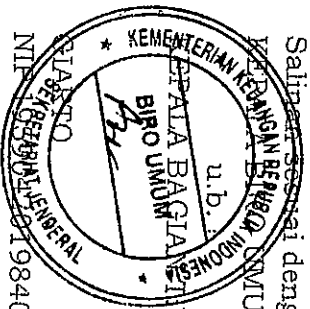
NIP

Yang Meminta Konfirmasi,
(Jabatan dan Nama Lengkap)

NIP

Catatan:
Kolom (1) sampai dengan (5) : diisi oleh Pejabat yang meminta konfirmasi kepada KPP.
Kolom (6) dan (7) : diisi oleh KPP sesuai data yang dimiliki KPP pada saat konfirmasi ini dijawab

Selubung sesuai dengan aslinya



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

tt.d.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

12/5/14



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
FORMULIR KONFIRMASI
PADA

KANTOR PELAYANAN UTAMA/KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 124/PMK.05/2012
TENTANG
MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH MILLENNIUM
CHALLENGE CORPORATION

Nama Importir	:	
Alamat Importir	:	
NPWP Importir	:	

NO	ITEM	DATA	HASIL KONFIRMASI	KETERANGAN
1.	Pemberitahuan Impor Barang			
	Nomor Pengajuan			
	Tanggal Pengajuan			
	Nomor Pendaftaran			
	Tanggal Pendaftaran			
2.	Invoice			
	Nomor			
	Tanggal			
3.	Bill of Lading / Airway Bill			
	Nomor			
	Tanggal			
4.	Keputusan Pemberian Izin Impor Sementara			
	Nomor			
	Tanggal			

Kepala KPU / KPPBC

Jakarta, bulan ...tahun
KPA / PPK

(Nama) _____
NIP _____

(Nama) _____
NIP _____

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN TU. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP. 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

h





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 124/PMK.05/2012
TENTANG
MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH *MILLENNIUM
CHALLENGE CORPORATION*

KOP SURAT KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS

KETETAPAN KPA

NOMOR

TENTANG

PENGGANTIAN PAJAK DAN KEPABEANAN

- lambaca : 1. Surat Konfirmasi Pajak dari KPP Nomor tanggal ...
2. Surat Konfirmasi Kepabeanan dari KPU/KPPBC Nomor ... tanggal ...

MEMUTUSKAN:

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.05/2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah *Millennium Challenge Corporation*, ditetapkan pemberian penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan sebagai berikut:

- . Jumlah uang :
- . Yang berhak menerima : Terlampir
- . Nomor rekening : Terlampir
- . Atas beban : DIPA Satker Nomor tanggal
- . Sumber dana : Rupiah Murni
- . Pencairan dana dilakukan melalui KPPN ...

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KPA Satker

(nama lengkap)
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

LAMPIRAN
KETETAPAN SATKER
NOMOR

NO	NAMA	NOMOR REKENING DAN NAMA BANK	JUMLAH UANG
1	2	3	4

KPA Satker

(nama lengkap)
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRU UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T. KEMENTERIAN
BIRU UMUM
GIARTO
NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO